



**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UPAH MINIMUM,
DAN PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI
JAWA TIMUR PERIODE 2010-2015**

SKRIPSI

Oleh:

**Hendra Hadi Atullah
NIM 140810101123**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UPAH MINIMUM,
DAN PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI
JAWA TIMUR PERIODE 2010-2015**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

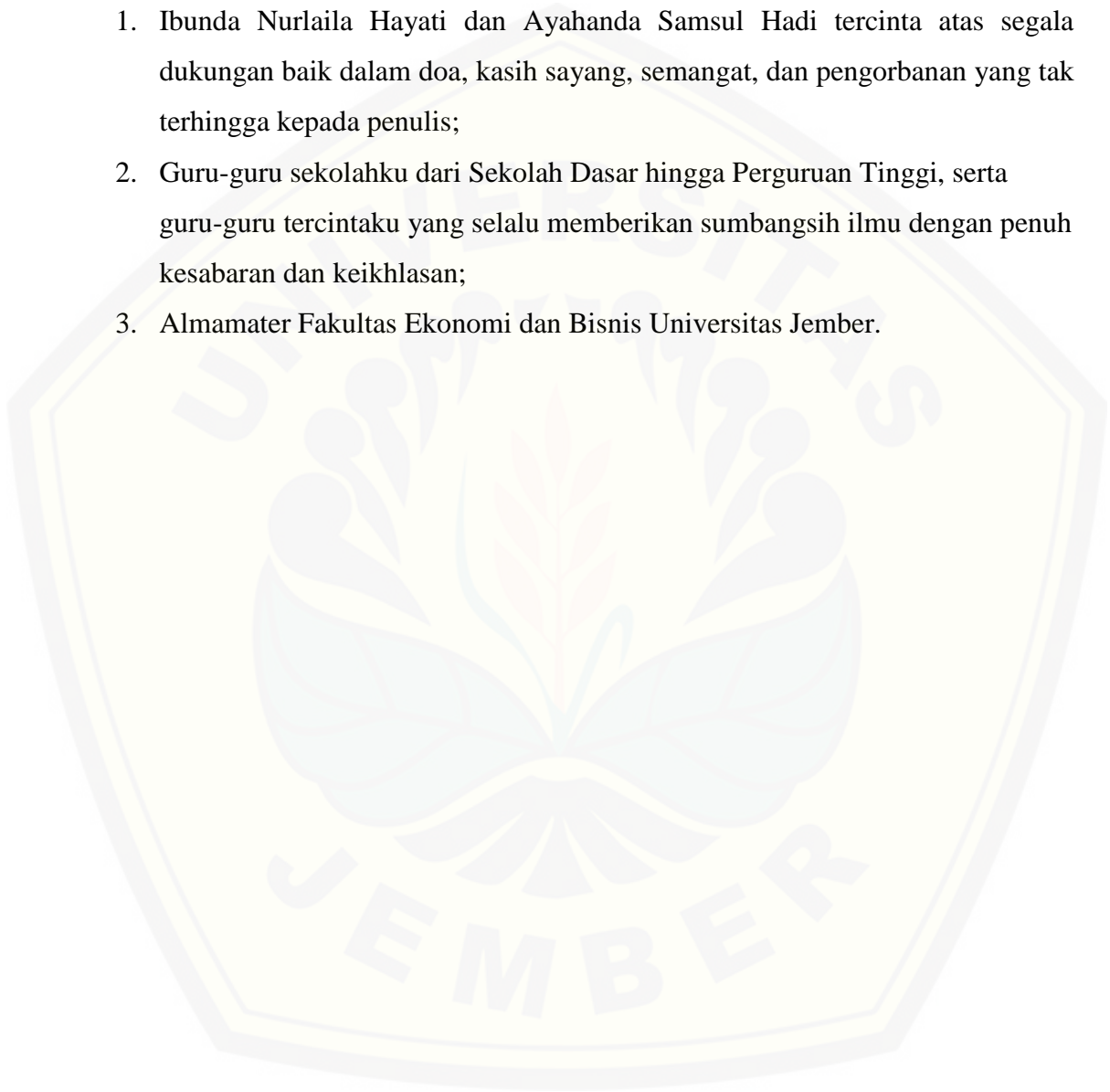
**Hendra Hadi Atullah
NIM 140810101123**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Nurlaila Hayati dan Ayahanda Samsul Hadi tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Guru-guru sekolahku dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

لَا زِيَادَتَكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ

“Jika kamu bersyukur maka akan Aku tambah.”

(Ibrahim:7)

“Orang hebat tak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan.
Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata.”

(Dahlan Iskan)

“Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari.”

(Barrack Obama)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Hadi Atullah

NIM : 140810101123

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur periode 2010-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Februari 2018

Yang menyatakan,

Hendra Hadi Atullah

NIM 140810101123

SKRIPSI

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UPAH MINIMUM,
DAN PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI
JAWA TIMUR PERIODE 2010-2015**

Oleh

Hendra Hadi Atullah
NIM 140810101123

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Badjuri, ME

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum,
dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di
Jawa Timur periode 2010-2015

Nama Mahasiswa : Hendra Hadi Atullah

NIM : 1140810101123

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc

Dr. Badjuri, ME.

NIP. 195608311984031002

NIP. 195312251984031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UPAH MINIMUM,
DAN PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI
JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hendra Hadi Atullah

NIM : 140810101123

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

09 Maret 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr.Moehammad Fathrorrazi, M.Si (.....)
NIP. 196306141990021001
2. Sekertaris : Dr.Rafael Purtomo Somaji, M.Si (.....)
NIP. 195810241988031001
3. Anggota : Dr.Lilis Yuliati, S.E., M.Si (.....)
NIP. 196907181995122001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP. 19710727199512101

Hendra Hadi Atullah

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, upah minimum dan Pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan berupa time series (tahun 2010-2015) dan cross section (29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode Fixed Effect digunakan alat bantu software Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2010-2015, akan tetapi upah minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2010-2015.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Pengangguran,
Jumlah Penduduk Miskin

Effect of Human Development Index, Minimum Wages, and Unemployment on Poor Population in East Java Perioed 2010-2015

Hendra Hadi Atullah

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Human Development Index, minimum wage and unemployment to the number of poor people. This research is a quantitative research using panel data, data used in the form of time series (2010-2015) and cross section (29 districts and 9 cities in East Java province). Data used in this research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the journal as a supporter. The analytical method used is the method of linear regression analysis of panel data with Fixed Effect method used Eviews software tool 10. The results showed that, Human Development Index variables and unemployment have a significant influence on the number of poor people in Java, 2010-2015, but the minimum wage has no significant effect on the number of poor people in East Java in 2010-2015.

Key words: Human Development Index, Minimum Wages, Unemployment, Poor Population.

RINGKASAN

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur periode 2010-2015; Hendra Hadi Atullah; 140810101123; 2018; Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir dkk., 2008).

Berbagai kebijakan serta program pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah pada intinya bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Selama masa pemerintahan orde baru, upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dikatakan cukup berhasil. Namun setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1998 angka kemiskinan kembali meningkat, sehingga hasil dari kinerja pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan masih belum maksimal. Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan fungsi pemerintah (Hudaya, 2009).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada akhir tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 4.648.530 juta jiwa. Jumlah ini tergolong cukup besar mengingat provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menyumbang pendapatan negara yang cukup besar.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia sebesar -6.364069 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya setiap kali indeks pembangunan manusia mengalami penurunan sebesar koefisien 6,364069 maka jumlah penduduk miskin akan bertambah. Nilai koefisien regresi variabel upah minimum sebesar 0,003070 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,1813 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 1.218338 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0025 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya setiap kali tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar koefisien 1.1218338, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah.

Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan pengangguran mempunyai pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Sedangkan upah minimum tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2010-2015.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur periode 2010-2015” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Badjuri, ME. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. M. Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Ibunda Nurlaila Hayati dan Ayahanda Samsul Hadi yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa;
8. Chandra Putra Wirawan dan Nabila Tri Oktavia selaku kakak dan adik kandung penulis yang telah memberi dukungan;
9. Rekan-rekan terbaik penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2014 Nurma Kamelia, Maruf Hanuraga, Halimatus Putrya, Bagus Suryo, Razan Febri, Dea Magdalena, Gita Triya, Triana Wulandari, Wardtul, Devira Nuarisa, dan Devi Oktavia terimakasih atas motivasinya;
10. Rekan-rekan UKM Paduan Suara FEB Ibel P, Bunga Sartika, Muhammad Agil, dan Livia Gusti;
11. Teman-teman KKN 14 Desa Legundi Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, Esi Kamasita, Resky Andi, Wardatul Asfiah, Ayna Devita, Aan Ubaidillah, M.Ariyanto, Uswatun Khasanah, dan Anju Sadifah;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 08 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	4
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Kemiskinan	5
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia.....	8
2.1.3 Upah Minimum	12
2.1.4 Pengangguran.....	14
2.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen	17
2.3 Penelitian Terdahulu	18

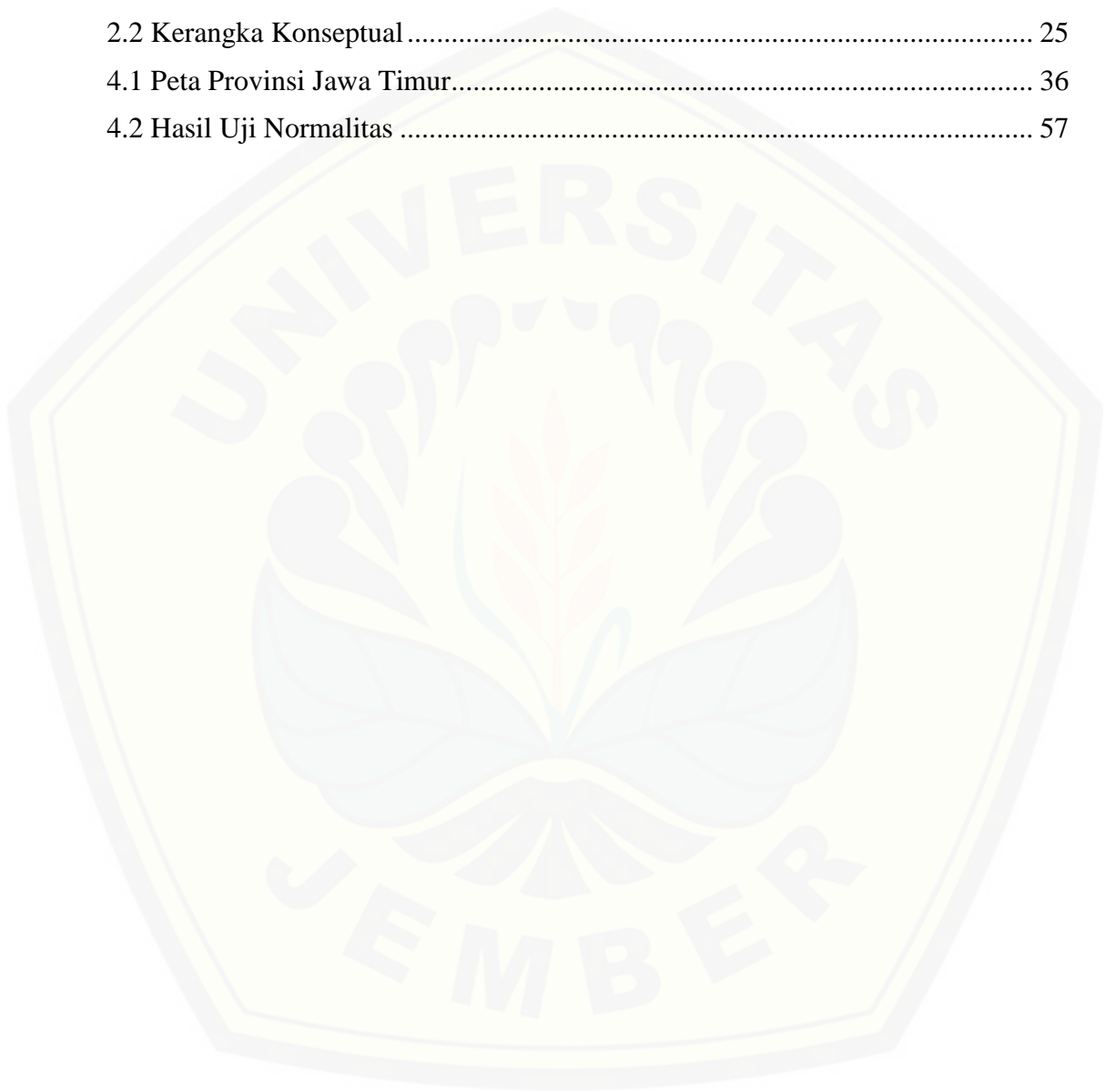
2.4 Kerangka Konseptual	25
2.5 Hipotesis.....	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian.....	27
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.3 Jenis Data	27
3.4 Metode Analisis Data.....	28
3.4.1 Analisis Regresi Data Panel.....	28
3.4.2 Pengujian Model Estimasi.....	31
3.5 Uji Statistik	32
3.6 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.7 Definisi Operasional.....	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum	36
4.1.1 Letak Geografi	36
4.2 Gambaran Umum Variabel	38
4.2.1 Gambaran Umum Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur.....	38
4.2.2 Gambaran Umum IPM di Jawa Timur.....	41
4.2.3 Gambaran Umum Upah Minimum di Jawa Timur	43
4.2.4 Gambaran Umum Pengangguran di Jawa Timur.....	45
4.3 Hasil Penelitian	47
4.3.1 Hasil Uji Model Estimasi	47
4.3.2 Hasil Regresi Data Panel.....	49
4.4 Hasil Uji Statistik	50
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	53
4.6 Pembahasan.....	58
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia	2
1.2 Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak 5 Provinsi di Indonesia.....	2
2.1 Pengelompokan IPM.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu	21
4.1 Wilayah Adminstratif Jawa Timur.....	38
4.2 Jumlah Pendudul Miskin Jawa Timur.....	39
4.3 IPM Jawa Timur.....	41
4.4 Upah Minimum Jawa Timur	43
4.5 Pengangguran Jawa Timur	45
4.6 Hasil Uji Chow.....	48
4.7 Hasil Uji Hausmen	48
4.8 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect</i>	49
4.9 Hasil Uji F.....	51
4.10 Hasil Uji T.....	52
4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	53
4.12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
4.14 Hasil Uji Autokorelasi.....	55
4.15 Jumlah Penduduk Berumur 15 Keatas yang Bekerja.....	60

DAFTAR GAMBAR

2.1 Konsep Lingkaran Setan Kemiskinan.....	7
2.2 Kerangka Konseptual.....	25
4.1 Peta Provinsi Jawa Timur.....	36
4.2 Hasil Uji Normalitas	57



DAFTAR LAMPIRAN

A	Data Jumlah Penduduk Miskin, IPM, Upah Minimum, dan Pengangguran..	69
B	Hasil Uji Chow	76
C	Hasil Uji Hausmen	77
D	Hasil Regresi Data Panel (<i>fixed effect</i>)	78
E	Hasil Uji Multikolinearitas.....	79
F	Hasil Uji Heteroskedastisitas	80
G	Hasil Uji Autokorelasi	81
H	Hasil Uji Normalitas	82

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro dalam Masjkuri, 2007).

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir dkk., 2008).

Berbagai kebijakan serta program pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah pada intinya bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Selama masa pemerintahan orde baru, upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dikatakan cukup berhasil. Namun setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1998 angka kemiskinan kembali meningkat, sehingga hasil dari kinerja pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan masih belum maksimal. Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan fungsi pemerintah (Hudaya, 2009).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih terbilang sangat tinggi, meskipun BPS setiap tahunnya merilis data yang menyatakan penurunan angka penduduk miskin di Indonesia. Namun bukan berarti Indonesia mengalami perbaikan secara signifikan karena penurunan angka penduduk miskin tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2010-2016 (Juta Jiwa)

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
2010	11,10	19,93	31,02
2011	10,95	18,94	29,89
2012	10,51	18,09	28,59
2013	10,63	17,92	28,55
2014	10,36	17,37	27,73
2015	10,62	17,89	28,51
2016	10,49	17,28	27,76

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada tahun 2017 menggambarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia menurun dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2016 sebesar 27,76 juta jiwa, 17,28 juta jiwa penduduk miskin di desa dan 10,49 juta jiwa penduduk miskin di kota.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak 5 Provinsi di Indonesia 2016

Provinsi	Kota	Desa	Kota + Desa
Sumatra Utara	690,34	743,17	1 452,55
Jawa Barat	2 543,30	1 579,82	4 168,11
Jawa Tengah	1 879,55	2 561,63	4 493,75
Jawa Timur	1 552,77	3 042,89	4 638,53
NTT	112,48	1 033,39	1 150,08

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, hal ini diikuti dengan besarnya angka penduduk miskin di Jawa Timur. Berdasarkan tabel 1.2 Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada akhir tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 4.648.530 juta jiwa. Jumlah ini sangat besar mengingat

provinsi Jawa Timur dikenal sebagai pusat kawasan timur di Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Faktor penyebab kemiskinan di Jawa Timur tinggi antara lain disebabkan oleh tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah, kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan rendahnya pendapatan, indeks pembangunan manusia yang rendah, distribusi tidak merata, dan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Meskipun setiap tahunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur terus mengalami penurunan tetap perlu perhatian khusus dari pemerintah yang nantinya akan menciptakan perubahan untuk Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur?
2. Seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur?
3. Seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dikemukakan maka manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah dalam masalah kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan IPM, upah minimum dan pengangguran
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kemiskinan
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sejenis

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty treshold*).

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam ukuran kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lainnya seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum. Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2001).

Menurut *World Bank*, dalam definisi kemiskinan adalah: *“The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other”*. Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

1. Penggolongan Kemiskinan

Penggolongan Kemiskinan Para pemikir ekonomi menggolongkan kemiskinan kedalam tiga golongan yaitu: Kemiskinan Struktural, Kemiskinan

Absolut dan Kemiskinan Relatif. Menurut Kuncoro (2010), kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama adalah kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi kemiskinan.

Dalam pendapat lain mengemukakan bahwa penggolongan kemiskinan didasarkan pada dua golongan (Sudarwati,2009):

- a. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan yang lainnya. Contohnya: seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada suatu daerah tertentu bisa jadi yang termiskin di daerah lainnya.
- b. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diderita seseorang atau keluarga apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan serta pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Jadi perbedaan antara kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut terletak pada standar penilaiannya dimana kemiskinan relatif ditentukan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan untuk standar penilaian kemiskinan absolut ditentukan dari kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan berdasarkan garis kemiskinan
- c. Kemiskinan Kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
- d. Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan Karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu

tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

2. Penyebab Kemiskinan

Penyebab Kemiskinan Menurut (Todaro dan Smith, 2006) tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Selanjutnya, menurut (Jhingan, 2012), terdapat tiga penyebab dan akibat yang saling terkait pada kemiskinan pada negara berkembang yaitu:

- a. Prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian.
- b. Sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif.
- c. Penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah lama dan ketinggalan.

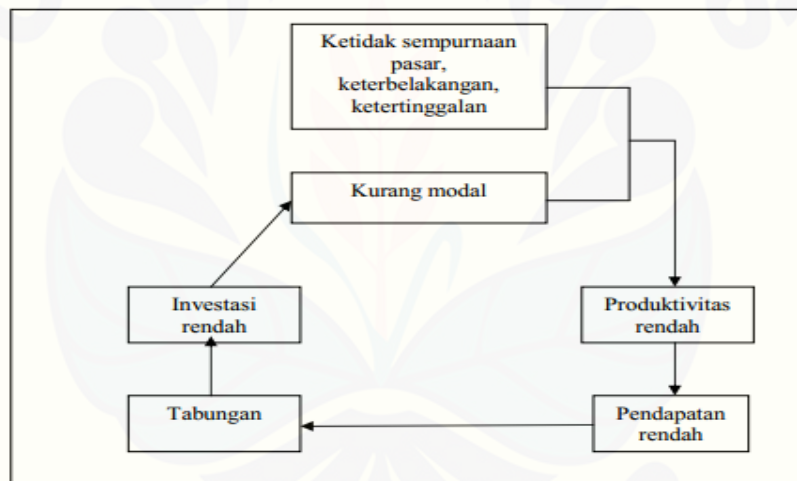
Sementara itu menurut Sharp et al. (dalam Kuncoro, 2010) mengidentifikasi penyebab kemiskinan diukur dari sisi ekonomi :

- a. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas yang rendah dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

3. Teori Konsep Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori lingkaran setan kemiskinan ditemukan oleh Ragnar Nurkse, dimana dia mengatakan: *“a poor country is poor because it is poor”*. Menurut Nurkse,

penyebab kemiskinan suatu wilayah ini berkonsep pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Lingkaran setan kemiskinan adalah deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin berada dalam keadaan melarat. Penyebab kemiskinan pada konsep lingkaran setan kemiskinan bersumber dari adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, ketertinggalan, yang kemudian menyebabkan kemiskinan (Kuncoro, 2010). Alur lingkaran setan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 2.1



2.1 Gambar Konsep Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle Nurkse*).

(Sumber: Kuncoro, 2010)

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Investasi sumber daya manusia akan membentuk modal manusia (human capital) yang akan memberikan imbalan berupa penghasilan yang lebih besar di masa mendatang. Sama halnya dengan investasi dibidang usaha tersebut, maka investasi dilakukan juga dibidang sumber daya manusia yang dikorbankan adalah

sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi yang diperoleh sebagai imbalannya adalah tingkat penghasilan lebih tinggi untuk mampu mencapai kenaikan pada pengeluaran. Investasi yang demikian dinamakan human capital. Penerapannya dapat dilakukan dalam hal (1) pendidikan dan latihan), (2) migrasi, (3) perbaikan gizi dan kesehatan (Simanjuntak dalam Saputri, 2014)

Konsep pembangunan manusia lebih luas dari pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Sumber Daya Manusia, pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan awalnya hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi khususnya di Negara berkembang. Arah dan konsep pembangunan diarahkan pada tujuan pemerataan sebagai sebagaimana konsep redistribusi pertumbuhan yang menitikberatkan pada mekanisme ekonomi, social, dan institusional demi meningkatkan standart hidup masyarakat (Todara dan Smith, 2006).

Pengembangan sumber daya manusia disatu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat. Dipihak lain pembinaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembinaan sumber daya manusia dimulai dalam kalangan keluarga, ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan formal dan dikembangkan dalam masyarakat terutama pada lingkungan kerja. Perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian sangat menuntut kepada sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan.

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu produktivitas (*productivity*); Pemerataan (*equity*); keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara lintas sektoral, diantaranya adalah :

1. Peningkatan kualitas fisik manusia (*individual fisycal quality*) yang meliputi jasmani, rohani dan motivasi, serta kualitas kecukupan kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gizi, sandang, perumahan daan pemukiman yang sehat.
2. Peningkatan kualitas keterampilan (*skills*) sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
4. Peningkatan pranata dan penerapan hukum yang meliputi kelembagaan, perangkat, & aparat, serta kepastian hukum. Sedangkan secara sektoral, operasionalnya dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

1. Indeks Harapan Hidup

Hal ini menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun, diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Perhitungan indeks pendidikan mencakup data indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan.

3. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real perkapita GDP *adjusted*. Untuk penghitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB perkapita karena PDRB perkapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap ^{paling} dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandartkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

1. Metode Penghitungan IPM

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

Indeks Kesehatan :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Indeks Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Indeks Pengeluaran :

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM kedalam beberapa kategori, yaitu

Tabel 2.1 Pengelompokan IPM

No.	Tingkat Status	Kriteria
1	Rendah	<50
2	Sedang	50,0 – 65,9
3	Tinggi	66,0 – 79,9
4	Sangat Tinggi	>80

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

2.1.3 Upah Minimum

Menurut Tjiptoherijanto (1996) mengatakan bahwa upah bagi para pekerja memiliki 2 (dua) sisi manfaat yaitu sebagai imbalan atau balas jasa terhadap

output produksi yang dihasilkan dan sebagai perangsang bagi peningkatan produktivitas. Sebagai imbalan, upah merupakan hak dari pekerja terhadap tenaga atau pikiran yang telah dikeluarkannya. Sebagai perangsang produktivitas, upah dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk bekerja lebih giat lagi apalagi jika standar upah didasarkan pada *merit system*.

Penetapan besarnya upah minimum yang harus dibayar perusahaan kepada tenaga kerjanya sangat penting dalam pasar tenaga kerja. Upah minimum menurut Badan Pusat Statistika merupakan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku pada setiap region. Upah minimum menurut Badan Pusat Statistika bertujuan untuk mengangkat derajat penduduk terlebih lagi yang berpendapatan rendah.

Kebijakan pemerintah di Indonesia mengenai upah minimum tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 : Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, tunjangan tetap merupakan suatu jumlah imbalan yang diterima oleh tenaga kerja secara tetap dan teratur dalam pembayarannya, dimana tidak dikaitkan dengan kehadiran maupun tingkat prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum yaitu tercapainya penghasilan yang layak bagi pekerja.

Upah minimum pada awalnya ditentukan secara sektoral secara nasional oleh Departemen Tenaga Kerja. Namun dalam perkembangan otonomi daerah, pada tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh setiap provinsi. Upah minimum sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Upah minimum regional, merupakan upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi pekerja pada tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku pada suatu daerah tertentu.
2. Upah minimum sektoral, merupakan upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor.

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum yaitu untuk memenuhi standart hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Dimana dengan adanya upah minimum akan mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah. Semakin meningkatnya upah minimum akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, upah minimum memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkatnya upah minimum dalam masyarakat, akan mengurangi kemiskinan yang ada (Jundi, 2014).

1. Jenis – Jenis Upah Minimum

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 jangkauan wilayah upah minimum meliputi:

- a. Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- b. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota.
- c. Upah minimum sektoral provinsi (UMPProp) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi
- d. Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSKab) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten/kota.

2.1.4 Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun dia belum bisa mendapatkannya. Seseorang yang tergolong pengangguran akan mengalami pengurangan atau bahkan ketiadaan pendapatan. Ketiadaan pendapatan tersebut akan menyebabkan seseorang untuk mengurangi jumlah konsumsinya (Sukirno, 2004).

Bahwa tingkat pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk terhadap perekonomian, individu dan masyarakat, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak Pemerintah berkurang sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi dan pengangguran tidak akan menggalakkan perekonomian (Nanga, 2011)

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2008). Pengangguran menurut *World Bank* merupakan individu yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Jenis-jenis pengangguran

1. Jenis-Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

a. Pengangguran Alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.

b. Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah: Perkembangan teknologi, kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain, kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.

d. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

2. Jenis - jenis pengangguran berdasarkan cirinya:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah dari pada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

b. Pengangguran tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c. Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran pada masa - masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengah menganggur

2.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.2.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Lanjouw dkk (dalam Saputra, 2011) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang

pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin kesehatan dan pendidikan aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Kanbur et al.(dalam Yudha, 2013) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang.

2.2.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman dalam Yudha, 2013).

Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.

2.2.3 Pengaruh Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Arsyad (2010) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno,2008)

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Studi Restuty Anggereny Rumahorbo (2010) berjudul “*Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 kota Kabupaten /Kota di Jawa Tengah tahun 2003 – 2007)*”

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. dengan variabel meliputi tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan pengangguran. Obyek pada penelitian ini adalah 35 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Metode yang digunakan adalah metode analisis panel data (*pooled data*), yang bertujuan untuk mengkombinasikan antara deret waktu (*time-series data*) dan deret kerat lintang (*cross-section data*). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan regresi panel data dengan penggunaan variabel

dummy. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang ada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampelnya adalah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

2. Okta Ryan Pranata Yudha (2013) berjudul “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, TPT, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*”

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis factor factor yang mempengaruhi kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia. Dijelaskan bahwa besarnya angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi . Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan variable pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh negative dan signifikan sedangkan upah minimum dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011

3. Riana Puji Lestari (2016) berjudul “ *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015*”

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis *Analisis* faktor-faktor yang memepengaruhi kemiskinan di Provinsi Lampung. dijelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan PDRB. Dimana peneliti berpendapat bahwa factor-faktor diatas lah yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan metode Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan PDRB berpengaruh negative tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan

4. Studi Sinta Anggraeny (2016) berjudul “*Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Lampung*”

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengungkap secara empiris kemiskinan di Provinsi Lampung dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan PDRB. Dimana metode yang digunakan adalah Metode Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negative antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pada variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

5. Studi Izzatun Zuliani (2009) berjudul “*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*”

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga. dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi serta kekurangan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok (utama) yang disebabkan oleh akibat sampingan dari suatu kebijaksanaan yang tidak dapat dihindari, kemiskinan akan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk masyarakat lapisan bawah sehingga membawa pada gejala kemiskinan yang bersifat multidimensional. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan OLS(Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan pendapatan, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

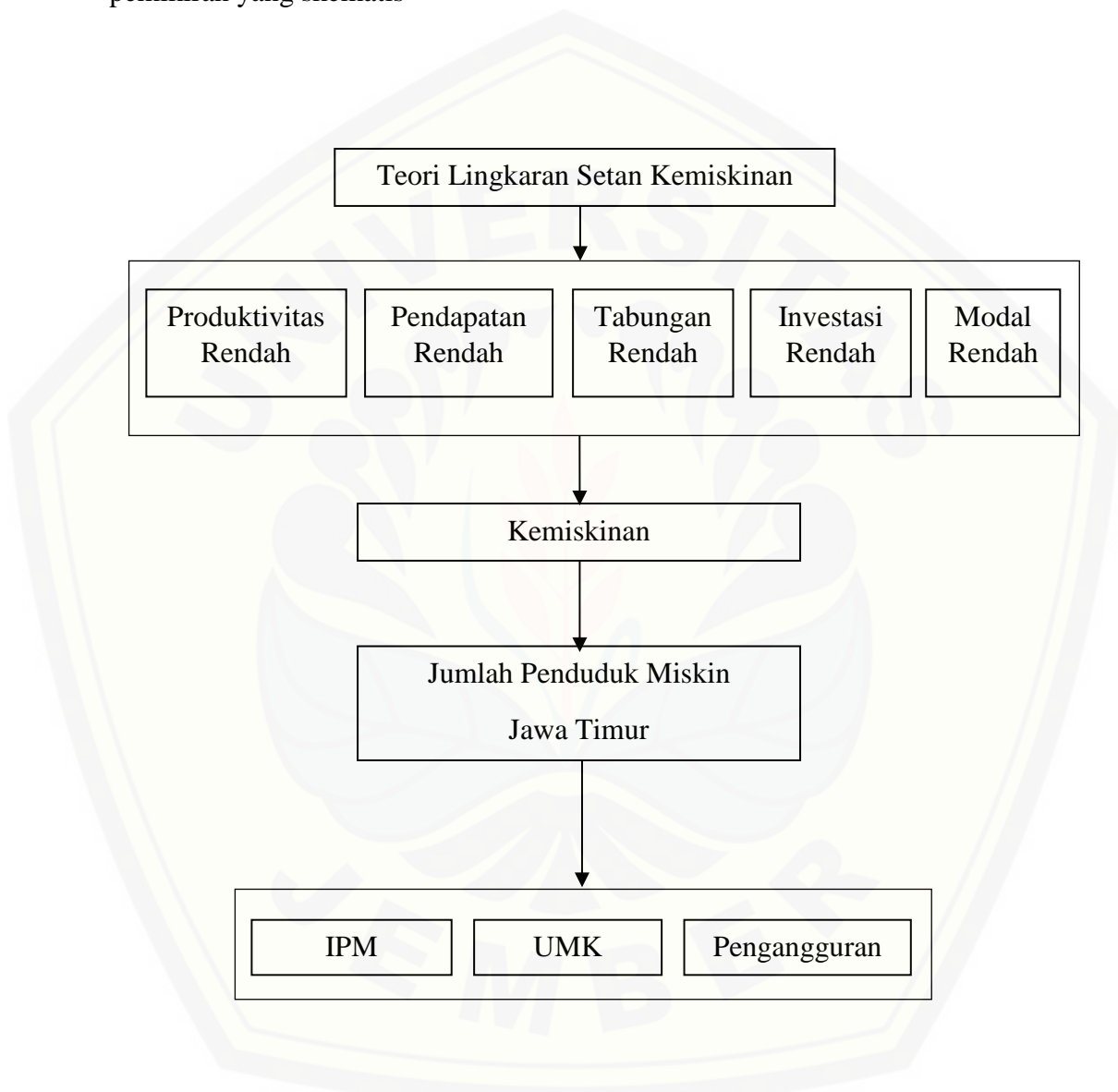
No	Judul	Variabel dan Metoda Analisa	Kesimpulan
1	<p>Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 kota Kabupaten /Kota di Jawa Tengah tahun 2003 – 2007)</p> <p>Tahun : 2010 Jenis : Skripsi Peneliti : Adit Agus Prastyo Tujuan : Menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.</p>	<p>Tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan pengangguran. Metode analisis panel data (<i>pooled data</i>),</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, pengangguran berpengaruh secara signifikan</p>
2	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, TPT, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011</p> <p>Tahun : 2013 Jenis : Skripsi Peneliti : Okta Ryan Pranata Yudha Tujuan : Menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, TPT, dan Inflasi. Metode analisis panel data</p>	<p>pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh negative dan signifikan sedangkan upah minimum dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia</p>

3	<p>Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015 Tahun : 2016 Jenis :Skripsi Peneliti : Riana Puji Lestari Tujuan : Menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Lampung</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan PDRB. Metode Regresi Linier Berganda</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan PDRB berpengaruh negative tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan</p>
4	<p>Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB, Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun : 2013 Jenis : Skripsi Peneliti : Wirawan Tujuan : Menganalisis pengaruh Pendidikan, PDRB, tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali</p>	<p>Jumlah Penduduk Miskin, Pendidikan, PDRB, Tingkat Pengangguran Metode Regresi Linier Berganda</p>	<p>Variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan</p>
5	<p>Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Desa Jetis Kecamatan Besuki</p>	<p>Pendapatan, pendidikan, dan jumlah tanggungan keluarga secara simultan terhadap tingkat</p>	<p>Tingkat Pendapatan, Pendidikan, dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh secara signifikan</p>

<p>Kabupaten Situbondo Tahun : 2009 Jenis : Skripsi Peneliti : Izzatun Zuliani Tujuan : Menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo</p>	<p>kemiskinan serta jumlah tanggungan keluarga secara parsial Metode OLS (Ordinary Least Square)</p>	<p>terhadap kemiskinan di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo</p>
--	--	---

2.4 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diperoleh dari landasan teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori (Sugiyono, 2009). Hipotesis pada dasarnya berfungsi untuk mengungkapkan masalah. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur
2. Upah Minimum diduga berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur
3. Pengangguran diduga berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dilihat dari pendekatan analisisnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Azwar (2001) mengungkapkan bahwa penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik. Jenis penelitian menggunakan penelitian *explanatory* (penjelasan) yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variable-variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam metode penelitian *explanatory* ini menjelaskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti (Nasir, 1998)

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Jawa Timur menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber seperti jurnal, studi pustaka, data dari BPS, dan dinas-dinas terkait lainnya

Waktu penelitian dimulai pada tahun 2010 hingga 2015 di Jawa Timur. Alasan tersebut diambil karena jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan menganalisis faktor apa saja yang dimungkinkan menjadi penyebab angka kemiskinan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan objek jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain berupa data yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber seperti jurnal, studi pustaka, data dari dinas dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang merupakan penggabungan dari deret berkala (*time-series*) dari tahun 2010-2015 dan deret lintang (*cross-section*) (38 observasi di Jawa Timur). Secara umum sumber data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik

masing-masing kota di provinsi Jawa Timur. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian:

- a. Data jumlah penduduk miskin 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2015
- b. Data Indeks Pembangunan Manusia 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2015
- c. Data Upah Minimum 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2015
- d. Data tingkat pengangguran terbuka 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2015

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Model Analisis Regresi Data Panel, Uji Statistik, dan Uji Asumsi Klasik.

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara tingkat Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, dan Pengangguran yaitu analisis data panel, dimana merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series data*) dan deret hitung (*cross section data*). Model persamaan variable dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e_{it}$$

Fungsi diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan pengangguran, sedangkan alpha nol merupakan konstanta. Diasumsikan bahwa variabel lain diluar variabel penelitian tidak berubah.

Keterangan :

- Y = Jumlah Penduduk Miskin
- a = Konstanta
- i = Kota/Kabupaten
- t = Waktu
- b_1 = Parameter X1
- b_2 = Parameter X2
- b_3 = Parameter X3
- X1 = Indeks Pembangunan Manusia
- X2 = Upah Minimum
- X3 = Pengangguran
- ϵ_t = Variabel Penganggu

Gujarati (2012) Analisis data menggunakan regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan diantaranya :

1. Data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian, negara, dan lain-lain, dari waktu ke waktu, ada batasan *heterogenitas* dalam unit-unit tersebut.
2. Dengan menggabungkan antara obserbasi *time-series* dan *cross-section*, data panel memberi “lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variable, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien.”
3. Dengan mempelajari observasi *cross-section* yang berulang-ulang, data panel paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. Misalkan tingkat penganggurann, perputaran pekerjaan, dan mobilitas tenaga kerja, adalah paling tepat dipelajari menggunakan data panel.
4. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bias dilihat pada data *cross-section* murni atau *time-series*

murni. Contohnya, dampak dari aturan upah minimum pada ketenagakerjaan dan pendapatan dapat dengan baik dipelajari jika kita memasukkan secara berurutan data peningkatan upah minimum federal dan/atau upah minimum Negara bagian.

5. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. Contohnya, fenomena keekonomian berskala (*economic of scale*) dan perubahan teknologi lebih tepat dipelajari menggunakan data panel daripada data *cross-section* murni atau *time-series* murni.
6. Dengan membuat data menjadi berjumlah beberapa ribu unit, data panel dapat meminimumkan bias yang bias terjadi jika kita mengagregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi besar.

Selanjutnya, menurut Basuki dan Yuliadi (dalam Qadrunnada, 2017) terdapat tiga model estimasi dalam analisis regresi data panel :

1. *Common Effect Model* (CEM)

Merupakan bentuk estimasi paling sederhana karena hanya menggunakan kombinasi data *time-series* dan *cross-section* tanpa memperhatikan dimensi waktu maupun individu/wilayah. Sehingga mengasumsikan perilaku setiap individu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode estimasi ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS)

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan teknik *variable dummy* untuk melihat perbedaan intersep antar individu/wilayah, namun terdapat kesamaan slop antar wilayah. Teknik ini juga sering disebut sebagai *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

3. *Random Effect Model* (REM)

Model ini mengestimasi data panel dimana *variable gangguan* mungkin saling berhubungan antar wilayah. Pada model ini perbedaan intersep diakomodasi oleh *error term* masing-masing wilayah. Keuntungan menggunakan

model ini adalah menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga biasa disebut sebagai *Error Component Model* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*

3.4.2 Pengujian Model Estimasi Data Panel

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel lebih baik menggunakan *fixed effect model* atau *common effect model*. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji *chow* yaitu : jika H_0 diterima maka digunakan model *common effect* dan jika H_0 ditolak maka digunakan model *fixed effect*. Jika nilai probabilitas *chi-square* kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *fixed effect model* dan jika probabilitas *chi-square* lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *common effect model*. Analisis data panel kemudian dilanjutkan dengan uji hausmen.

2. Uji Hausmen

Uji Hausmen adalah uji yang digunakan untuk memilih model *fixed effect model* atau *random effect model*. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji hausmen adalah jika H_0 diterima maka digunakan *random effect model* dan jika H_0 ditolak maka digunakan model *fixed effect model*. Apabila nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *fixed effect model* dan jika nilai probabilitas lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *random effect model*.

3. Uji *Lagrange Multiplier (LM)*

Uji *Lagrange Multiplier* adalah uji yang digunakan untuk memilih model antara *common effect model* atau *random effect model*. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji LM adalah jika H_0 diterima maka digunakan *common effect model* dan jika H_0 ditolak maka digunakan *random effect model*. Apabila nilai probabilitas pada Breusch Pagan yang ditunjukkan oleh angka yang dibawah kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *random effect model* dan jika nilai probabilitas pada Breusch Pagan yang ditunjukkan oleh angka yang dibawah lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *common effect model*.

3.5 Uji Statistik

Tujuan dilakukannya uji statistik guna dapat mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan pengangguran serta koefisien dari variabel terkait yaitu jumlah penduduk miskin dengan melakukan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan determinasi berganda (R^2) (Kristanto, 2013)

3.5.1 Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilihat dari nilai probabilitas F statistik, apabila nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.2 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilihat dari nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka variabel independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Siagan dan Sugiarto (2006) koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linear X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh beragamnya dalam variabel X). Bila nilai koefisien determinasi sama dengan satu, berarti garis regresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh. Dalam hal nilai koefisien determinasi sama dengan satu berarti ragam naik turunnya Y seluruhnya disebabkan oleh X. Dengan demikian bila nilai X

diketahui, nilai Y dapat diramalkan secara sempurna. Jadi kegunaan determinasi adalah :

- a. Sebagai ukuran ketetapan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap sekelompok data hasil observasi. Makin besar nilai R^2 semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Sebaliknya makin kecil nilai R^2 makin tidak tepat garis regresi tersebut dalam mewakili data hasil observasi.
- b. Mengukur besar proporsi (presentasi) dari jumlah ragam Y yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan variable penjelas X terhadap ragam variable respon Y .

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Multikorelasi

Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variable bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikolinearitas) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variable bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari korelasi sederhana yang relative tinggi (0,8 atau lebih), jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2 Uji Heterokedastisitas

Menurut Wijaya (2009), heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variable tidak sama untuk semua pengamatan/observasi. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heteroskedastisitas (Sarjono dan Julianita, 2011). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian menggunakan uji Glejser. Glejser (dalam Ansofino et al, 2016) mengatakan bahwa varian, variable gangguan nilainya tergantung dari variable independen yang ada dalam model. Maka, Glejser menyarankan untuk melakukan regresi fungsi-fungsi residual. Dengan cara :

- a. Lakukan regresi tahap model dengan metode OLS, kemudian dapatkan residualnya.
- b. Dapatkan nilai absolut residualnya
- c. Lakukan regresi nilai absolut residual dengan variable independennya (X)
- d. Jika nilai statistic $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak mengandung masalah heterokedastisitas, demikian sebaliknya.

3.6.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi biasa digunakan dalam penelitian menggunakan data time series dan juga cross section. Salah satu uji yang sering digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson akan menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) yang nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai Durbin-Watson table yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower DL)

3.6.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data. Uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standard deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian parametric-test (uji parametik) adalah data harus memiliki distribusi normal (atau berdistribusi normal). Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan Sig. dibagian Kolmogorov-Smirnov karena data yang diuji lebih besar daripada 50 (respondennya lebih dari 50 orang). Jika angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig. $> 0,05$ menunjukkan data berdistribusi normal. Namun, jika angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig. $< 0,05$ menunjukkan data tidak berdistribusi normal (Sarjono dan Julianita, 2011).

3.7 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Definisi variabel operasional bertujuan untuk memberikan batasan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan persepsi yang berlainan dan menyamakan pandangan penulis dan pembaca serta menghindari meluasnya permasalahan dari judul. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Penduduk Miskin (Y) adalah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan . Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk miskin 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2015. (dalam juta jiwa/tahun)
2. Indeks Pembangunan Manusia (X1) adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau secara lebih spesifik merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah negara, provinsi atau kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Manusia ini dinyatakan dalam persen pertahun.diambil dari BPS
3. Upah Minimum Kabupaten (X2) adalah upah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku pada suatu daerah dimana penetapan upah minimum ini berdasarkan standar hidup yang terdapat pada masing-masing daerahnya, sehingga diharapkan tenaga kerja yang bekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya pada masing-masing kota/kabupaten di Jawa Timur tahun. Data yang dipakai adalah data upah minimum kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2015 (dalam Rp) diambil dari BPS
4. Pengangguran Terbuka (X3) : persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2015 yang diukur dalam satuan persen (dalam persen) diambil dari BPS.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Bab 4, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

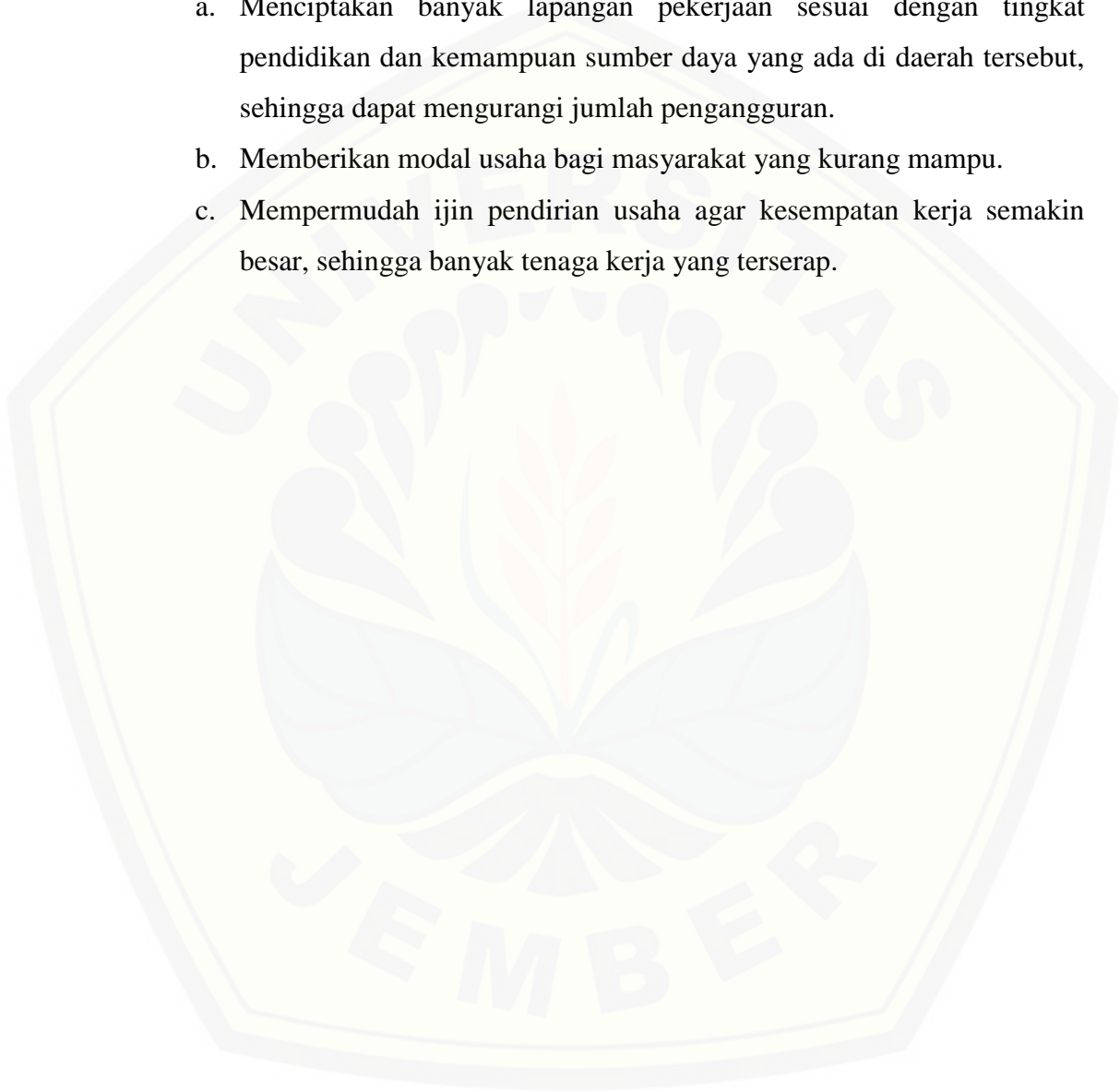
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015, maka hipotesis yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan diterima.
2. Upah minimum tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015, maka hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan signifikan ditolak.
3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015, maka hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan diterima.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur harus lebih meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui faktor kesehatan, pendidikan, serta daya beli masyarakat. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah nantinya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan jumlah penduduk miskin berkurang.
2. Pemerintah harus tetap melestarikan bahwa penetapan upah minimum harus berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).
3. Pada tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya

pengangguran yang belum terserap di dunia kerja. Pengangguran ini dapat menyebabkan penambahan masalah pada penduduk miskin. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat pengangguran juga harus diturunkan dengan cara :

- a. Menciptakan banyak lapangan pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan sumber daya yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.
- b. Memberikan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu.
- c. Mempermudah izin pendirian usaha agar kesempatan kerja semakin besar, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri. 2012. *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010*. *Econosains (Online)*.
- Anggriawan, et al. 2015. *Pengaruh Upah Minimum dan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ansofino, et al. 2016. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish
- Ariefianto, M. D. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- BAPPENAS and UNDP Indonesia, Indonesia Human Development Report. (2004). *The Economics Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Published Jointly by BPS- Statistic Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia* . BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat pengangguran terbuka*. BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Upah Minimum Provinsi*. BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Jumlah Penduduk Miskin*. BPS Jawa Timur
- Departemen Tenaga Kerja RI Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Dewi, Novita. 2017. *Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Pekanbaru : penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Jurnal JOM Fekon Vol:4. No.1. Februari 2017
- Febrianca, DN. 2015. *Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Malang: Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Jurnal ilmiah
- Fhadillah, et al. 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatan PerKapita Tingkat Pengangguran IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Soedirman. Jurnal EKO_REGIONAL. Vol:11. No.1. Maret 2016
- Ghozali, I. 2014. *Ekonomi Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, D.N., 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.

- Hartono, et al. 2017. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan PDRB terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan
- Hermawan, Irwan. *Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan*. Sekretariat Jendral DPR RI. Jurnal Mimbar. Vol:28. No.2 Desember 2012
- Hudaya, D.2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Skripsi. Bogor : Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jundi, Al Musi. 2014. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi – Provinsi di Indonesia*. Skripsi : UNDIP
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Mahsunan, Durrotul. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Unesa
- Masjkuri, Siti Umajah. 2007. *Perbaikan Kampung Komprehensif dan Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial serta Kemandirian Masyarakat Miskin Kumuh di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mulyaningsih, Yani. 2008. *Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor public terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan*. Tesis : Universitas Indonesia.
- Nanga, Muana, 2011. *Makroekonomi: teori, masalah dan kebijakan*, Raja Grafindo Persada.
- Nasir et al. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta
- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Peraturan Republik Indonesia, No. 13. Tahun 2009 tentang. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Di perbanyak oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Qadrunnada, L. 2017. *Analisis Pengaruh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi Dan Rasio Gini Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Rahayu, S. 2009. *Penggunaan Metode Durbin Watson dalam Menyelesaikan Model Regresi yang Mengandung Autokorelasi*. Skripsi. Medan: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.
- Retnowati, et al. *Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto
- Saputra, Wisnu Adhi. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Diponegoro. (dipublikasikan)
- Sarjono, H, dan Julianti, W. 2011. *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarwati, Ninik., 2009, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, Malang: Inti Media.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J.1995. *Ekonometrik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Tjipthoherijanto, P. 1996. *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi, untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia
- Widiarti, Diah. 2006. *Peranan Upah Minimum Dalam Penentuan Upah Di Sektor Informal Di Indonesia*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.
- Widyawati, Wari Nila. 2017. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin Se-Karesidenan Madiun Tahun 2004-2010*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- World Bank. 2004. *Mewujudkan Pelayanan Umum Bagi Masyarakat Miskin*. The World Bank, Jakarta.
- Yacoub, Yarlina. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak. Jurnal. Vol:8. Oktober 2012

Yudha, Okta Ryan. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*. Skripsi : Univesitas Negeri Semarang



LAMPIRAN

Lampiran A. Data Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum, dan Pengangguran per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015

Kota/Kabupaten	Tahun	JPM	IPM	UMK	TPT
Kab. Bangkalan	2010	255.6	57.23	755	5.79
Kab. Bangkalan	2011	239.5	58.63	850	6.37
Kab. Bangkalan	2012	229	59.65	885	5.13
Kab. Bangkalan	2013	217.4	60.19	983	6.78
Kab. Bangkalan	2014	212.2	60.71	1102	5.68
Kab. Bangkalan	2015	216.23	61.49	1267.3	5
Kab. Banyuwangi	2010	175.1	64.54	824	3.92
Kab. Banyuwangi	2011	164	65.48	865	6.06
Kab. Banyuwangi	2012	156.6	66.12	915	3.41
Kab. Banyuwangi	2013	151.6	66.74	1086.4	4.65
Kab. Banyuwangi	2014	147.7	67.31	1240	7.17
Kab. Banyuwangi	2015	146	68.08	1426	2.55
Kab. Blitar	2010	135.5	64.79	655	2.24
Kab. Blitar	2011	126.9	65.47	750	3.91
Kab. Blitar	2012	121.2	66.17	820	2.82
Kab. Blitar	2013	119.8	66.49	946.8	3.64
Kab. Blitar	2014	116.7	66.88	1000	3.08
Kab. Blitar	2015	114.12	68.13	1260	2.79
Kab. Bojonegoro	2010	227.2	62.19	825	3.29
Kab. Bojonegoro	2011	212.9	63.22	870	5.7
Kab. Bojonegoro	2012	203.3	64.2	930	3.42
Kab. Bojonegoro	2013	196	64.85	1023.5	5.81
Kab. Bojonegoro	2014	190.9	65.27	1140	3.21
Kab. Bojonegoro	2015	193.99	66.17	1311	5.01
Kab. Bondowoso	2010	131.9	59.47	668	1.59
Kab. Bondowoso	2011	123.6	60.46	735	3.01
Kab. Bondowoso	2012	118.1	62.24	800	3.6
Kab. Bondowoso	2013	114.8	63.21	946	2.04
Kab. Bondowoso	2014	111.9	63.43	1105	3.72
Kab. Bondowoso	2015	113.72	63.95	1270.7	1.75
Kab. Gresik	2010	193.9	69.9	1010.4	7.7
Kab. Gresik	2011	181.7	71.11	1130	5.93

Kab. Gresik	2012	173.8	72.12	1257	6.78
Kab. Gresik	2013	170.9	72.47	1740	4.55
Kab. Gresik	2014	166.9	72.84	2195	5.06
Kab. Gresik	2015	170.76	73.57	2707.5	5.67
Kab. Jember	2010	311.8	59.94	830	2.71
Kab. Jember	2011	292.1	60.64	875	3.34
Kab. Jember	2012	279	61.31	920	3.77
Kab. Jember	2013	277.4	62.43	1091.9	3.94
Kab. Jember	2014	270.4	62.64	1270	4.64
Kab. Jember	2015	269.54	63.04	1460.5	4.77
Kab. Jombang	2010	166.5	66.2	790	5.27
Kab. Jombang	2011	156	66.84	866.5	6.58
Kab. Jombang	2012	149.1	67.82	978.2	6.72
Kab. Jombang	2013	137	68.63	1200	5.59
Kab. Jombang	2014	133.5	69.07	1500	4.39
Kab. Jombang	2015	133.75	69.59	1725	6.11
Kab. Kediri	2010	232.8	66.24	837	3.75
Kab. Kediri	2011	218.1	66.84	934.5	8.33
Kab. Kediri	2012	208.3	67.29	999	4.08
Kab. Kediri	2013	201.9	68.01	1089.5	4.65
Kab. Kediri	2014	196.8	68.44	1135	4.91
Kab. Kediri	2015	199.38	68.91	1305.2	5.02
Kab. Lamongan	2010	220.6	65.4	875	3.62
Kab. Lamongan	2011	206.7	66.21	900	6.14
Kab. Lamongan	2012	197.2	67.51	950	4.75
Kab. Lamongan	2013	191.3	68.9	1075.7	4.93
Kab. Lamongan	2014	186.1	69.42	1220	4.3
Kab. Lamongan	2015	182.64	69.84	1410	4.1
Kab. Lumajang	2010	140.8	59.62	688	3.17
Kab. Lumajang	2011	131.9	60.72	740.7	3.16
Kab. Lumajang	2012	126	61.31	825.4	4.6
Kab. Lumajang	2013	123.9	61.87	1011.9	2.01
Kab. Lumajang	2014	120.7	62.33	1120	2.83
Kab. Lumajang	2015	118.51	63.02	1288	2.6
Kab. Madiun	2010	102.3	64.87	660	5.55
Kab. Madiun	2011	95.8	65.98	720	4.96
Kab. Madiun	2012	91.5	67.32	775	3.99
Kab. Madiun	2013	83.4	68.07	960.7	4.63
Kab. Madiun	2014	81.2	68.6	1045	3.38

Kab. Madiun	2015	84.74	69.39	1196	6.99
Kab. Magetan	2010	80.3	67.58	650	2.41
Kab. Magetan	2011	75	68.52	705	3.95
Kab. Magetan	2012	71.6	69.56	750	3.64
Kab. Magetan	2013	76	69.86	866.2	2.96
Kab. Magetan	2014	74	70.29	1000	4.28
Kab. Magetan	2015	71.16	71.39	1150	6.05
Kab. Malang	2010	306.8	63.47	1000	4.49
Kab. Malang	2011	287.4	63.97	1077.6	5.51
Kab. Malang	2012	274.6	64.71	1130.5	3.75
Kab. Malang	2013	287.4	65.2	1343.7	5.17
Kab. Malang	2014	280.3	65.59	1635	4.83
Kab. Malang	2015	292.87	66.63	1882.2	4.95
Kab. Mojokerto	2010	125.4	68.14	1009.1	4.84
Kab. Mojokerto	2011	117.5	68.71	1105	6.79
Kab. Mojokerto	2012	112.3	69.17	1234	3.35
Kab. Mojokerto	2013	116.1	69.84	1700	3.16
Kab. Mojokerto	2014	113.3	70.22	2050	3.81
Kab. Mojokerto	2015	113.86	70.85	2695	4.05
Kab. Nganjuk	2010	151.7	65.6	650	3.64
Kab. Nganjuk	2011	142.1	66.58	710	6.31
Kab. Nganjuk	2012	135.7	68.07	785	4.09
Kab. Nganjuk	2013	140.2	68.98	960.2	4.73
Kab. Nganjuk	2014	136.5	69.59	1131	3.93
Kab. Nganjuk	2015	132.04	69.9	1265	2.1
Kab. Ngawi	2010	149.2	64.52	685	4.8
Kab. Ngawi	2011	137.8	65.84	725	5.1
Kab. Ngawi	2012	131.2	66.72	780	2.94
Kab. Ngawi	2013	127	67.25	900	4.97
Kab. Ngawi	2014	123.2	67.78	1040	5.61
Kab. Ngawi	2015	129.32	68.32	1150	3.99
Kab. Pacitan	2010	105.4	65.36	630	0.87
Kab. Pacitan	2011	98.7	66.06	705	1.54
Kab. Pacitan	2012	94.1	66.74	750	1.02
Kab. Pacitan	2013	91.3	67.55	887.2	0.99
Kab. Pacitan	2014	88.9	68.14	1000	1.08
Kab. Pacitan	2015	92.08	68.95	1150	0.97
Kab. Pamekasan	2010	179.2	59.37	900	3.53
Kab. Pamekasan	2011	167.9	60.42	925	2.61

Kab. Pamekasan	2012	160.3	61.21	975	2.29
Kab. Pamekasan	2013	153.1	62.27	1059.6	2.17
Kab. Pamekasan	2014	148.8	62.66	1090	2.14
Kab. Pamekasan	2015	146.92	63.1	1201.7	4.26
Kab. Pasuruan	2010	199.3	60.79	1005	3.49
Kab. Pasuruan	2011	186.7	61.43	1107	4.3
Kab. Pasuruan	2012	178.5	62.31	1252	6.38
Kab. Pasuruan	2013	175	63.74	1720	4.34
Kab. Pasuruan	2014	170.7	64.35	2190	4.43
Kab. Pasuruan	2015	169.19	65.04	2700	6.41
Kab. Ponorogo	2010	113	61.14	635	3.83
Kab. Ponorogo	2011	105.9	62.03	705	6.79
Kab. Ponorogo	2012	101.1	62.94	745	3.14
Kab. Ponorogo	2013	102.6	63.38	924	3.25
Kab. Ponorogo	2014	99.9	63.81	1000	3.66
Kab. Ponorogo	2015	103.22	64.92	1150	3.68
Kab. Probolinggo	2010	276.7	59.83	744	2.02
Kab. Probolinggo	2011	259.2	60.3	814	2.8
Kab. Probolinggo	2012	247.6	61.33	888.5	1.92
Kab. Probolinggo	2013	237.8	62.61	1198.6	3.3
Kab. Probolinggo	2014	231.9	63.04	1353.7	1.47
Kab. Probolinggo	2015	236.96	63.83	1556.8	2.51
Kab. Sampang	2010	285.5	54.49	690	1.77
Kab. Sampang	2011	267.5	55.17	725	2.13
Kab. Sampang	2012	252.6	55.78	800	1.71
Kab. Sampang	2013	247.2	56.45	1104.6	4.68
Kab. Sampang	2014	239.6	56.98	1120	2.22
Kab. Sampang	2015	240.35	58.18	1231.6	2.51
Kab. Sidoarjo	2010	145.5	73.75	1005	8.35
Kab. Sidoarjo	2011	136.3	74.48	1107	8.65
Kab. Sidoarjo	2012	130	75.14	1252	5.37
Kab. Sidoarjo	2013	137.6	76.39	1720	4.12
Kab. Sidoarjo	2014	133.8	76.78	2190	3.88
Kab. Sidoarjo	2015	136.13	77.43	2705	6.3
Kab. Situbondo	2010	105.2	60.07	660	3.13
Kab. Situbondo	2011	98.6	60.82	737	4.77
Kab. Situbondo	2012	94.1	62.23	802.5	3.33
Kab. Situbondo	2013	90	63.43	1048	3.01
Kab. Situbondo	2014	87.7	63.91	1071	4.15

Kab. Situbondo	2015	91.17	64.53	1209.9	3.57
Kab. Sumenep	2010	256.7	57.27	730	1.89
Kab. Sumenep	2011	242.5	58.7	785	1.99
Kab. Sumenep	2012	231.4	60.08	825	1.14
Kab. Sumenep	2013	224.6	60.84	965	2.56
Kab. Sumenep	2014	218.9	61.43	1090	1.01
Kab. Sumenep	2015	216.84	62.38	1253.5	2.07
Kab. Trenggalek	2010	108	63.67	635	2.15
Kab. Trenggalek	2011	101.2	64.27	710	3.27
Kab. Trenggalek	2012	96.6	65.01	760	2.98
Kab. Trenggalek	2013	92.4	65.76	903.9	4.04
Kab. Trenggalek	2014	90	66.16	1000	4.2
Kab. Trenggalek	2015	92.17	67.25	1150	2.46
Kab. Tuban	2010	225.8	61.33	870	2.86
Kab. Tuban	2011	211.5	62.47	935	3.69
Kab. Tuban	2012	202	63.36	970	4.13
Kab. Tuban	2013	196.1	64.14	1144.4	4.3
Kab. Tuban	2014	191.1	64.58	1370	3.63
Kab. Tuban	2015	196.59	65.52	1575.5	3.03
Kab. Tulungagung	2010	105.4	67.28	641	3.5
Kab. Tulungagung	2011	98.7	67.76	720	3.56
Kab. Tulungagung	2012	94.3	68.29	815	3.1
Kab. Tulungagung	2013	91.3	69.3	1007.9	2.71
Kab. Tulungagung	2014	89	69.49	1107	2.42
Kab. Tulungagung	2015	87.37	70.07	1237	3.95
Kota Batu	2010	9.7	68.66	989	5.55
Kota Batu	2011	9.1	69.76	1050	4.82
Kota Batu	2012	8.7	70.62	1100.2	3.51
Kota Batu	2013	9.3	71.55	1268	2.3
Kota Batu	2014	9.1	71.89	1580	2.43
Kota Batu	2015	9.43	72.62	1877	4.29
Kota Blitar	2010	10.1	72.56	663	6.66
Kota Blitar	2011	9.5	73.08	737	5.24
Kota Blitar	2012	9.1	73.53	815	3.68
Kota Blitar	2013	10.14	74.53	924.8	6.17
Kota Blitar	2014	9.8	75.26	1000	5.71
Kota Blitar	2015	10.04	76	1243.2	3.8
Kota Kediri	2010	24.9	72.2	906	7.39
Kota Kediri	2011	23.3	72.93	975	9.69

Kota Kediri	2012	22.3	73.66	1037.5	8.12
Kota Kediri	2013	22.7	74.18	1128.4	7.92
Kota Kediri	2014	22.1	74.62	1165	7.66
Kota Kediri	2015	23.77	75.67	1339.7	8.46
Kota Madiun	2010	10.4	75.98	685	9.52
Kota Madiun	2011	9.7	76.48	745	10.62
Kota Madiun	2012	9.3	77.21	812.5	6.89
Kota Madiun	2013	8.7	78.41	953	6.57
Kota Madiun	2014	8.5	78.81	1066	6.93
Kota Madiun	2015	8.55	79.48	1250	5.1
Kota Malang	2010	48.5	76.69	1006.2	8.68
Kota Malang	2011	45.4	77.36	1079.8	9.74
Kota Malang	2012	43.4	78.04	1132.2	7.96
Kota Malang	2013	40.9	78.44	1340.3	7.73
Kota Malang	2014	40.6	78.96	1587	7.22
Kota Malang	2015	39.1	80.05	1882.2	7.28
Kota Mojokerto	2010	8.9	72.78	805	7.52
Kota Mojokerto	2011	8.3	73.47	835	10.59
Kota Mojokerto	2012	7.9	74.2	875	7.52
Kota Mojokerto	2013	8.2	74.91	1040	5.73
Kota Mojokerto	2014	8	75.04	1250	4.42
Kota Mojokerto	2015	7.72	75.54	1437.5	4.88
Kota Pasuruan	2010	16.8	69.69	865	7.23
Kota Pasuruan	2011	15.7	70.41	926	6.22
Kota Pasuruan	2012	15	72.01	975	4.54
Kota Pasuruan	2013	14.6	72.89	1195.8	5.41
Kota Pasuruan	2014	14.2	73.23	1360	6.09
Kota Pasuruan	2015	14.52	73.78	1575	5.57
Kota Probolinggo	2010	41.4	67.3	741	6.85
Kota Probolinggo	2011	38.8	68.14	810.5	5.46
Kota Probolinggo	2012	40.8	68.93	885	5.26
Kota Probolinggo	2013	39	70.05	1103.2	4.48
Kota Probolinggo	2014	19	70.49	1250	5.16
Kota Probolinggo	2015	18.66	71.01	1437.5	4.01
Kota Surabaya	2010	195.7	77.2	1031.5	6.84
Kota Surabaya	2011	183.3	77.62	1115	7.81
Kota Surabaya	2012	175.1	78.05	1257	5.27
Kota Surabaya	2013	168.7	78.51	1740	5.32
Kota Surabaya	2014	164.4	78.87	2200	5.82

Kota Surabaya	2015	165.72	79.47	2710	7.01
---------------	------	--------	-------	------	------



Lampiran B. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	559.167158	(37,187)	0.0000
Cross-section Chi-square	1075.078297	37	0.0000

Cross-section fixed effect test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/22/18 Time: 17:38

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	839.5420	51.06783	16.43974	0.0000
X1	-11.97998	0.885798	-13.52451	0.0000
X2	0.070778	0.010331	6.850942	0.0000
X3	5.013397	2.372290	2.113316	0.0357

R-squared	0.508151	Mean dependent var	132.5867
Adjusted R-squared	0.501563	S.D. dependent var	80.05192
S.E. of regression	56.51670	Akaike info criterion	10.92434
Sum squared resid	715486.7	Schwarz criterion	10.98450
Log likelihood	-1241.374	Hannan-Quinn criter	10.94861
F-statistic	77.14130	Durbin-Watson stat	0.062046
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran C. Hasil Uji Hausmen

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: FEM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.510594	3	0.0006

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-6.364069	-6.713898	0.027046	0.0334
X2	0.003070	0.004417	0.000000	0.0118
X3	1.218338	1.229682	0.001250	0.7483

Cross-section fixed effect test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/22/18 Time: 17:40

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	563.6243	34.47894	16.34691	0.0000
X1	-6.364069	0.538284	-11.82288	0.0000
X2	0.003070	0.002288	1.341779	0.1813
X3	1.218338	0.397229	3.067099	0.0025

R-squared	0.995100	Mean dependent var	132.5867
Adjusted R-squared	0.994052	S.D. dependent var	80.05192
S.E. of regression	6.173939	Akaike info criterion	6.639963
Sum squared resid	7127.976	Schwarz criterion	7.256644
Log likelihood	-715.9558	Hannan-Quinn criter	6.888775
F-statistic	949.4049	Durbin-Watson stat	1.012551
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D. Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Fixed Effect

Cross-section fixed effect test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/22/18 Time: 17:38

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	563.6243	34.47894	16.34691	0.0000
X1	-6.364069	0.538284	-11.82288	0.0000
X2	0.003070	0.002288	1.341779	0.1813
X3	1.218338	0.397229	3.067099	0.0025

R-squared	0.995100	Mean dependent var	132.5867
Adjusted R-squared	0.994052	S.D. dependent var	80.05192
S.E. of regression	6.173939	Akaike info criterion	6.639963
Sum squared resid	7127.976	Schwarz criterion	7.256644
Log likelihood	-715.9558	Hannan-Quinn criter	6.888775
F-statistic	949.4049	Durbin-Watson stat	1.012551
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E. Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1.000000	-0.633405	0.048667	0.313611
X1	-0.633405	1.000000	0.378602	0.575635
X2	0.048667	0.378602	1.000000	0.130525
X3	0.313611	0.575635	0.130525	1.000000



Lampiran F. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Square
 Date: 01/23/18 Time: 15:24
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.63818	91.79797	0.802177	0.4235
X1	-0.356270	1.433147	-0.248593	0.8039
X2	-0.009506	0.006092	-1.560259	0.1204
X3	1.234560	1.057595	1.167329	0.2446

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.804503	Mean dependent var	44.77195
Adjusted R-squared	0.762685	S.D. dependent var	33.74264
S.E. of regression	16.43772	Akaike info criterion	8.598446
Sum squared resid	50527.12	Schwarz criterion	9.215127
Log likelihood	-939.2228	Hannan-Quinn criter	8.847258
F-statistic	19.23839	Durbin-Watson stat	0.784809
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran G. Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed effect test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/22/18 Time: 17:38

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	563.6243	34.47894	16.34691	0.0000
X1	-6.364069	0.538284	-11.82288	0.0000
X2	0.003070	0.002288	1.341779	0.1813
X3	1.218338	0.397229	3.067099	0.0025

R-squared	0.995100	Mean dependent var	132.5867
Adjusted R-squared	0.994052	S.D. dependent var	80.05192
S.E. of regression	6.173939	Akaike info criterion	6.639963
Sum squared resid	7127.976	Schwarz criterion	7.256644
Log likelihood	-715.9558	Hannan-Quinn criter	6.888775
F-statistic	949.4049	Durbin-Watson stat	1.012551
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran H. Hasil Uji Normalitas

